



Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Daniela Elisandra ¹, Anggraeny Puspaningtyas ², M Kendry Widiyanto ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: danielaaals12@gmail.com anggraenyuspa@untag-sby.ac.id kenronggo@untag-sby.ac.id

Abstract . *The number of stunting cases in Candi District has increased from 270 cases in 2022 to 485 cases in 2023 as of September. The aim of this research is to analyze policy evaluation using evaluation indicators according to William N Dunn (2003;610), namely; Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness and Accuracy, as well as supporting and inhibiting factors for implementing policies to accelerate stunting reduction in Candi District, Sidoarjo Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Based on the research results, the implementation is still not going well and is less than optimal. This is because there are still complaints about infrastructure or facilities, lack of coordination and commitment between Regional Apparatus Organizations, limited budget funds, lack of community participation and inaccuracies in the delivery of socialization materials. Supporting factors for the Accelerated Stunting Reduction Policy in Candi District include; coordination and commitment of policy implementers, competent communication and human resources, active community participation, access to clean water, mindset and parenting patterns of parents, economic factors, monitoring and evaluation systems, adequate budget funds and good and appropriate communication of policy implementers. Meanwhile, inhibiting factors in implementing this policy include; there is inappropriate provision and misuse of aid, data validation errors, lack of coordination and commitment between Regional Apparatus Organizations.*

Keywords: Policy, Evaluation, Stunting.

Abstrak . Angka kasus stunting di Kecamatan Candi mengalami kenaikan dari 270 kasus pada 2022 menjadi 485 kasus pada 2023 per September. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi kebijakan menggunakan indikator evaluasi menurut William N Dunn (2003;610) yaitu; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaannya masih belum berjalan baik dan kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat keluhan infrastruktur atau fasilitas, kurangnya koordinasi dan komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah, keterbatasan anggaran dana, kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi sosialisasi. Faktor pendukung dari Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Candi antara lain; koordinasi dan komitmen pelaksana kebijakan, komunikasi dan Sumberdaya Manusia yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat, terdapat akses air bersih, pola pikir dan pola asuh dari orangtua, faktor ekonomi, sistem pemantauan dan evaluasi, kecukupan anggaran dana dan komunikasi pelaksana kebijakan yang baik dan tepat. Sedangkan, faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain; terdapat pemberian dan penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai, kesalahan validasi data, kurangnya koordinasi dan komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Stunting.

PENDAHULUAN

Sejak merebaknya pandemi penyakit virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 di Indonesia, perhatian pemerintah semakin besar terhadap masalah kesehatan. Pandemi Covid-19 telah membatasi aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa tingkat pengangguran di Indonesia menjangkau 7,86 juta orang pada Agustus 2023, sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,90 juta orang per Maret 2023. Pengangguran dan kemiskinan membuat

sulitnya memenuhi berbagai kebutuhan, terutama pangan. Kebutuhan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, termasuk permasalahan gizi atau stunting (Lituhayu et al., 2022). Stunting atau gizi buruk ialah masalah gizi kronis karena berkaitan dengan kekurangan gizi sebelumnya (Sutarto et al., 2018). Gizi buruk (malnutrition) ialah persoalan gizi yang serius berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi. Keterbelakangan pertumbuhan pada rahim janin juga bisa terjadi karena ibu kurang mengonsumsi protein selama hamil, namun hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik serta Kota Surabaya, tentunya punya potensi besar untuk semakin berkembang dan bersinar di berbagai bidang, dari ekonomi sampai infrastrukturnya. Namun, Kabupaten Sidoarjo jika dibandingkan dengan kondisi stunting di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yang wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Sidoarjo memiliki kondisi timpang jauh. Prevalensi stunting 2022 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebesar 16,1%, Kabupaten Gresik menunjukkan sebesar 10,7%, sedangkan di Kota Surabaya memiliki prevalensi stunting sebesar 4,8%. Angka prevalensi di Kota Surabaya ini merupakan prevalensi stunting terendah di wilayah provinsi Jawa Timur.

Menurut data yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 mencatat peningkatan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, bertambah dari 14,8% menjadi 16,1%. Hal ini mengindikasikan kenaikan sebesar 1,3% dalam tahun tersebut, menunjukkan bahwa stunting tetap menjadi isu signifikan yang perlu ditangani di Sidoarjo. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting di Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo optimis akan menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 14% yaitu target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023-2024. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dedikasinya dalam menangani masalah stunting di berbagai wilayah/kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan meningkatkan kesejahteraan anak melalui Kebijakan Program Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Hal-hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 89 tentang Percepatan Pengurangan Stunting Secara Menyeluruh, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Peran Desa dalam Perlindungan dan Pengurangan Angka Stunting Secara Terpadu.

Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, jumlah kasus stunting tahun 2022-2023 per September di Wilayah atau Kecamatan Candi mengalami kenaikan angka kejadian stunting pada tahun 2022 terdapat 270 kasus dan pada tahun 2023 per

September terdapat 485 kasus dari jumlah 13.326 balita (0-59 bulan), 2.578 bayi (0-11 bulan), 5.213 baduta/masa 1000 HPK (0-23 bulan) pada Tahun 2023 di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan di Kecamatan Candi ini dirumuskan dalam sebuah program/kegiatan meliputi beberapa kegiatan di puskesmas dan posyandu yaitu; posyandu balita, ibu hamil, dan remaja; kelas balita stunting; pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan gizi buruk pada balita, ibu hamil, dan remaja; peningkatan jangkauan dan mutu layanan gizi untuk rumah tangga selama 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) untuk ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun; dan kegiatan lain yang mendukung percepatan penurunan stunting. Namun, terdapat kenaikan kasus stunting yang merupakan ancaman signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan juga keunggulan daya saing bangsa.

Dari persoalan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian, guna mendapatkan informasi yang tepat terkait evaluasi pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dalam penanganan kasus stunting di Kecamatan Candi. Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan, karena dengan evaluasi, maka akan diketahui faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan akan terungkap. Maka dari itu, peneliti merumuskan permasalahan antara lain; 1) Evaluasi kebijakan percepatan penurunan stunting dan 2) Faktor pendukung dan factor penghambat pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Selanjutnya, Tipe Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya mendalam mengenai individu/perorangan, organisasi, program kegiatan, atau bahkan lain sebagainya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang secara utuh dan mendalam dari suatu entitas, sehingga menghasilkan data yang selanjutnya dapat di analisis untuk menghasilkan teori. Penelitian ini mengarah kepada studi kasus karena sesuai tujuan dan keinginan peneliti bahwa, melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh terkait analisis evaluasi kebijakan percepatan penurunan stunting, serta analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Dalam penanganan permasalahan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, strategi kebijakan program dan tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kecamatan Candi dengan analisis indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan dalam (Hasbullah & Anam, 2019) sebagai berikut:

Efektivitas

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara akurat dengan tujuan yang sesuai dan arah kebijakan yang sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa target pelaksanaan kebijakan berhasil dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terdapat penurunan kasus stunting di Kecamatan Candi. Berdasarkan data surveilans (data berjalan) kasus stunting pada latar belakang tahun 2023 per September diketahui terdapat 485 kasus stunting di Kecamatan Candi, sedangkan pada data tahun 2023 per Desember menunjukkan angka kasus stunting sebesar 333 kasus, lalu pada tahun 2024 per Februari menunjukkan angka kasus stunting sebesar 351 kasus. Dari hasil data tersebut menunjukkan terdapat penurunan kasus stunting di Kecamatan Candi sebesar 134 kasus, penurunan tersebut dapat dikatakan cukup baik.

Dampak atau manfaat lain yang terlihat antara lain; masyarakat atau keluarga penderita stunting, maupun ibu hamil dapat mengetahui dan sadar akan bahaya stunting bagi balita, pola pengasuhan, pemberian makanan terbaik, pemberian ASI eksklusif, terdapat perkembangan status gizi dari adanya bantuan dan pemantauan lintas sektor dalam pertemuan minilokarya bulanan Puskesmas Candi lintas sektor yang melibatkan; Pihak Kecamatan, Kelurahan, Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kader Posyandu, Koramil, dan Polsek. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Candi terus merencanakan upaya-upaya percepatan penurunan stunting agar lebih optimal lagi.

Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) adalah upaya mencapai hasil secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Untuk keberlangsungan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting berjalan lancar, penyelesaian yang cepat dan tepat sesuai waktu seperti yang direncanakan dan teknis yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat keluhan waktu tunggu yang agak lama dan kondisi ruangan yang kurang nyaman (panas), khususnya terkait kekurangan kipas angin atau AC.

Selain itu, bantuan yang ditujukan untuk balita yang mengalami stunting dan keluarga dari lapisan masyarakat yang ekonominya rendah dapat merasakan dan menikmati secara langsung manfaatnya. Kebijakan ini menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting sesuai dengan komitmen pemerintah. Meskipun demikian, sumber dana yang diberikan oleh pemerintah mungkin tidak cukup optimal untuk mencakup semua aspek, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari APBD untuk melaksanakan kegiatan atau kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dalam implementasi kebijakan atau program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi ini dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yang ahli dalam bidangnya. Pelaksana kebijakan yang ahli didapat dari adanya pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan pengoptimalan potensi SDM dari berbagai segi yaitu, segi keterampilan, pengetahuan, maupun motivasi yang ada di Puskesmas Candi dan Posyandu.

Kecukupan

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) Kecukupan merujuk pada kesesuaian kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang telah ditetapkan, serta kerjasama di antara organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan mencakup sejauh mana efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul dalam konteks masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi yang diterapkan oleh pemerintah dinilai positif dan didukung oleh SDM yang memadai. Meskipun keadaan hidup mereka masih belum mencapai taraf sejahtera dan terdapat keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah, keberadaan kebijakan ini dianggap sangat membantu dalam mengurangi beban keuangan terkait kebutuhan balita mereka. Untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, salah satu tanggung jawab pelaksana kebijakan adalah melakukan pengawasan. Kecamatan Candi berperan penting dalam pengawasan, koordinasi dan alokasi dana, sementara program dan kegiatan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti puskesmas dan posyandu. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakcukupan anggaran dana dalam mengcover semua sasaran seperti dalam pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) pada anak stunting terdapat keterbatasan anggaran dana, sehingga sasaran yang tercover hanya 1.349 anak dari 4.743 anak atau semua target sasaran. Masing-masing antar OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya dinilai masih kurang berkoordinasi dan kurang berkomitmen.

Perataan

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) Perataan mengacu pada cara

pelayanan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dapat didistribusikan secara merata berdasarkan prinsip kesamaan manfaat yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi ini terdapat sosialisasi rutin yang membantu dalam menyadarkan masyarakat mengenai pengetahuan stunting, dampaknya, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, serta bantuan yang memang membawa manfaat bagi balita penderita stunting dan keluarganya. Namun di sisi lain, masih terdapat balita penderita stunting atau keluarganya yang belum mendapatkan peluang atas bantuan penanganan stunting karena keterbatasan dana yang belum bisa mencakup semua sasaran. Keterbatasan anggaran dana menyebabkan adanya prioritas bantuan yang diberikan pada wilayah atau keluarga yang kondisinya sangat parah dan miskin. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan bantuan pada mereka yang paling membutuhkan dan mengatasi kasus-kasus yang paling mendesak terlebih dahulu. Meskipun pemerataan secara keseluruhan mungkin masih belum tercapai, namun dengan mengutamakan mereka yang paling rentan, diharapkan dampaknya bisa dirasakan secara lebih merata dalam jangka panjang. Dari hal tersebut dapat memungkinkan dan menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat atau orangtua balita stunting yang belum mendapatkan bantuan penanganan stunting karena terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Candi.

Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) yaitu sejauh mana sebuah kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi, masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan dukungan mereka karena kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang positif dan dampak yang baik bagi masyarakat. Selama pelaksanaan kebijakan, para pelaksana yaitu Puskesmas candi, Posyandu Desa, bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berupaya responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan kebutuhan masyarakat atau balita penderita stunting. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga untuk aktif mendengarkan dan merespons masukan dari masyarakat demi memastikan bahwa upaya penanggulangan stunting benar-benar efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, terdapat variasi respons dari masyarakat yaitu ada yang menerima dengan baik, namun tidak jarang juga ada yang tidak menerima atau bahkan menolak. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam merespons dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan

program penurunan stunting, serta pentingnya terus beradaptasi dan memperbaiki program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam. Dengan cara ini, program penurunan stunting dapat menjadi lebih efektif dan lebih dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Ketepatan

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019), Ketepatan kebijakan percepatan penurunan stunting mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan masalah stunting, serta nilai-nilai yang mendasari tujuan program kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi rutin dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu setiap desa di Kecamatan Candi. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cukup baik sesuai teknis, namun pada praktiknya beberapa masyarakat atau keluarga balita penderita stunting tidak hadir dikarenakan beberapa alasan yang diduga yaitu kebiasaan atau budaya masyarakat yang malas hadir, masyarakat menganggap sosialisasi atau dampak stunting tidak penting, secara umum masyarakat sering kali tidak mengetahui atau tidak memahami tentang isi dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut.

Kegiatan kebijakan percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan dan diarahkan tepat kepada target maupun sasaran kebijakan, namun berdasarkan informasi yang diterima pada saat penelitian masih ada keterbatasan dalam menjangkau sasaran karena adanya keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan kurangnya ketepatan bantuan yang akan diberikan kepada sasaran. Selain terdapat bantuan penurunan stunting, terdapat pemantauan dan evaluasi tingkat Kabupaten Sidoarjo yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dihadiri oleh para OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga lainnya yang memantau dan mengevaluasi penurunan stunting secara rutin dilaksanakan oleh Puskesmas Candi dan Posyandu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan agar pelaksana kebijakan dapat mengidentifikasi dan melakukan perbaikan dari kegiatan-kegiatan kebijakan. Pemantauan di Puskesmas Candi kepada balita yang berkategori stunting parah dan ekonomi rendah di Puskesmas Candi dilakukan setiap minggu sekali dengan selama kunjungan tersebut, mereka diberikan paket nutrisi, biskuit, susu, dan vitamin yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan, bagi balita yang kondisinya tidak terlalu parah, mereka tetap mendapatkan perhatian dengan diberikan arahan dan edukasi kepada ibu tentang pola makan sehat dan perawatan, pola asuh anak.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting sangat penting dianalisis karena membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif. Faktor pendukung dapat diidentifikasi untuk diperkuat, sedangkan faktor penghambat perlu ditangani untuk mengurangi dampak negatifnya.

Faktor Pendukung

Adapun beberapa faktor pendukung yang ditemukan peneliti pada saat penelitian di lapangan antara lain:

1) Koordinasi dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Komitmen pelaksana kebijakan adalah kesediaan dan tekad yang kuat para pelaksana kebijakan diharapkan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ini mencakup kesediaan untuk mengalokasikan sumber daya, waktu, dan energi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen pelaksana kebijakan antar lintas sektor juga mengacu pada keterlibatan dan kerjasama yang kuat antara berbagai sektor atau lembaga dalam pemerintahan maupun masyarakat untuk melaksanakan suatu kebijakan. Ini melibatkan koordinasi (penggabungan) antara berbagai departemen atau lembaga pemerintah, serta keterlibatan aktif dari sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan kebijakan yang kompleks dan lintas sektor.

2) Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting karena beberapa alasan antarlain; Masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah stunting di tingkat lokal dan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stunting serta solusi yang mungkin efektif; Meningkatkan dukungan dan penerimaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi; dan Pemantauan dan evaluasi, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang efektif, membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3) Adanya Akses Air Bersih

Berdasarkan hasil penelitian akses air bersih juga termasuk faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Akses terhadap air bersih memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting karena beberapa alasan antarlain; kesehatan dan gizi, persiapan makanan dan konsumsi, praktik kebersihan, menyediakan nutrisi (air bersih).

Dengan demikian, akses yang memadai terhadap air bersih adalah faktor penting dalam kebijakan percepatan penurunan stunting karena berkontribusi langsung terhadap kesehatan, gizi, dan kebersihan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mencegah stunting pada anak-anak.

4) Pola Pikir dan Pola Asuh Orang tua

Pola pikir dan pola asuh orangtua memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan percepatan penurunan stunting karena; Pengaruh langsung pada pola makan anak, pola asuh yang sehat (termasuk pendidikan gizi dan promosi pola makan seimbang), praktik kesehatan dan kebersihan, pola pikir dan perilaku terkait gizi, pendidikan dan kesadaran. Dengan demikian, akses yang memadai terhadap air bersih adalah faktor penting dalam kebijakan percepatan penurunan stunting karena berkontribusi langsung terhadap kesehatan, gizi, dan kebersihan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mencegah stunting pada anak-anak.

5) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kebijakan penurunan stunting karena, akses terhadap makanan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan (konsultasi medis, pemeriksaan, dan perawatan kesehatan lainnya), akses ketersediaan air bersih dan sanitasi, dan akses pendidikan dan pengetahuan. Dengan demikian, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan penurunan stunting karena mempengaruhi akses terhadap layanan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak.

6) Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation/M&E) pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting sudah ada dan dilaksanakan rutin oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Candi, Puskesmas Candi dan Posyandu-posyandu desa, berperan penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan karena beberapa alasan antaralain; mengukur kemajuan implementasi kebijakan penurunan stunting, membantu dalam mengidentifikasi apa yang telah berhasil atau gagal, meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap masyarakat, dan menyediakan data dan bukti yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis fakta

7) Kecukupan Anggaran Dana

Anggaran dana yang cukup sangat penting dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting karena beberapa alasan kunci yaitu penyediaan sumber daya, dana yang

cukup memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program intervensi yang ditetapkan dalam kebijakan penurunan stunting. Ini termasuk pendanaan untuk program gizi, kesehatan, pendidikan, pelatihan, infrastruktur, pengawasan/ pemantauan, pengembangan inovasi dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

8) Komunikasi dan SDM yang Kompeten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Melalui komunikasi yang efektif, informasi mengenai program dan pentingnya penurunan stunting dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat, membangun kesadaran, dan mendukung partisipasi aktif dalam program tersebut. Selain komunikasi yang efektif, diperlukannya juga SDM yang kompeten dalam pelaksanaan, pelayanan, pemeriksaan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting. Komunikasi yang baik dan SDM yang kompeten juga membantu dalam; peningkatan kesadaran, pendidikan/informasi, partisipasi masyarakat, dukungan dan pemahaman, dan evaluasi/perbaikan.

Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat yang ditemukan peneliti pada saat penelitian di lapangan antara lain:

1) Pemberian dan Penyalahgunaan Bantuan yang Tidak Sesuai

Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah pemberian bantuan makanan yang tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, bantuan makanan mungkin tidak sampai kepada anak-anak yang menderita stunting, yang seharusnya menjadi penerima utama bantuan tersebut. Misalnya, bantuan makanan harusnya diberikan kepada penderita stunting, tetapi yang mengkonsumsi bukan penderita stuntingnya.

2) Kesalahan Validasi Data

Kesalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan data merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Terdapat berbagai kesalahan teknis selama proses pelaksanaan program, seperti penimbangan yang tidak akurat, pencatatan data yang salah, atau penggunaan alat ukur yang tidak sesuai, yang mengakibatkan ketidakvalidan data yang dikumpulkan. Kesalahan dalam proses penimbangan dapat terjadi saat mengukur berat badan anak-anak yang menjadi sasaran program penurunan stunting. Penimbangan yang tidak akurat bisa menghasilkan data

yang tidak tepat tentang status gizi anak.

3) Kurangnya Koordinasi dan Komitmen antar OPD

Kurangnya komitmen dari OPD dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi dan komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terdapat kecenderungan bagi setiap OPD untuk beroperasi secara mandiri, dengan memandang bahwa masalah stunting merupakan tanggung jawab utama dari Dinas Kesehatan saja, meskipun pada kenyataannya job desk masing-masing OPD dalam surat tugas tersebut telah diatur dengan jelas. Kurangnya komitmen antar OPD dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting mengindikasikan adanya masalah dalam koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah. Hal ini dapat menghambat efektivitas program dan menciptakan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam penanganan masalah stunting.

4) Kurangnya Partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo antarlain; terdapat masyarakat yang tidak mau hadir dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penurunan stunting seperti sosialisasi rutin, posyandu, pos gizi, dan kegiatan lainnya. Hal tersebut merupakan masalah dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang biasanya disebabkan oleh kurang kesadaran masyarakat mengenai kasus stunting. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting dapat menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ketika masyarakat tidak aktif terlibat, efektivitas program-program penurunan stunting dapat terganggu, sehingga menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas lapangan.

5) Keterbatasan Anggaran Dana

Meskipun kebijakan tersebut sudah berjalan, namun anggaran yang tersedia terbatas, terutama karena alokasi yang telah ditentukan dari pusat. Akibatnya, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk mencakup seluruh target yang ada dalam program penurunan stunting. Karena keterbatasan anggaran, dilakukanlah seleksi prioritas penerimaan bantuan stunting. Ini berarti hanya sebagian kecil dari total populasi yang mungkin memenuhi syarat mendapatkan bantuan tersebut dapat menerima bantuan penurunan stunting tersebut. Seleksi prioritas ini biasanya dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat keparahan stunting, kondisi sosio-ekonomi keluarga, atau faktor risiko lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan menggunakan analisis indikator evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang terdiri atas enam indikator (Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan) yaitu dalam pelaksanaannya masih belum berjalan baik dan kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan penerapan indikator efisiensi masih terdapat keluhan infrastruktur atau fasilitas yang kurang; penerapan indikator kecukupan masih terdapat kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, lembaga lainnya), serta keterbatasan anggaran dana; penerapan indikator perataan masih terdapat bantuan yang belum merata dikarenakan keterbatasan anggaran dana, sehingga diterapkan masyarakat atau wilayah prioritas penerima bantuan; dan penerapan indikator ketepatan masih terdapat masyarakat yang tidak mau hadir dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi sosialisasi.

Selanjutnya, analisis faktor pendukung dari Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo antara lain; koordinasi dan komitmen pelaksana kebijakan (Puskesmas, Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, lembaga lainnya), komunikasi dan SDM yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat, terdapat akses air bersih, pola pikir dan pola asuh dari orangtua, faktor ekonomi, sistem pemantauan dan evaluasi, kecukupan anggaran dana dan komunikasi pelaksana kebijakan yang baik dan tepat. Sedangkan, faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain; terdapat pemberian dan penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai, kesalahan validasi data, kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, lembaga lainnya), kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Kementerian Kesehatan. (2023, January 25). Kementerian Kesehatan rilis hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes (Klinik Kementerian Kesehatan).

Lituhayu, D., Dwimawanti, I. H., & Maesaroh, M. (2022, November 16). Analysis of community's role in implementation of stunting policy in Pemalang District. *European Union Digital Library*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2321365>

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. (2021).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. (2021).

Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, faktor resiko dan pencegahannya. *J Agromedicine*, 5(1).